
RELASI ETNIK DAN MASALAH INTEGRITAS

Mochd. Saad

Abstrak: Konsep masyarakat, dalam arti *society* sesungguhnya sudah ada jauh sebelumnya. Dalam abad 17 dan 18 timbul arti-arti lain yang sejalan dengan sifat dan anggapan yang spesifik dari golongan-golongan sosial. Dalam arti aristokrasi pengertian *society*; menunjuk kepada elite-elite sosial terutama terdapat di istana raja-raja di Eropa. Di antara golongan menengah istilah *society* memperoleh makna lain. Mereka membentuk berbagai organisasi di samping organisasi yang telah ada seperti gilda, bank dan lembaga-lembaga pendidikan.

Kata kunci: Relasi Etnik, Integritas

PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan cepat dan drastis dalam situasi sosial dan ekonomi masyarakat membutuhkan suatu pendekatan baru. Teori-teori lama bisa saja tidak sesuai lagi dengan pola-pola baru yang sedang berubah. **Hans Dieter Evers (1988)** menyatakan bahwa situasi seperti ini telah terjadi dalam dasawarsa terakhir ini, dimana teori struktural-fungsional tidak tepat lagi untuk menjelaskan perubahan-perubahan sosial. Disisi lain masih ada penulis yang tetap memanfaatkan teori tersebut sambil mensintesakan dengan teori konflik.

Ada tiga proses utama yang menyebabkan perlu penilaian kembali teori-teori masyarakat :

- a. Peristiwa-peristiwa politik akhir-akhir ini telah menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya terintegrasi ataupun bebas dan konflik. Tetapi konflik-konflik itu tidak semata-mata dalam struktur politik atau ekonomi, tetapi justru berkaitan secara erat dengan agama dan kebudayaan.
- b. Seluruh dunia telah terintegrasi kedalam satu sistem ekonomi global. Apa yang semula tampak sebagai sisa-sisa masyarakat tradisional, dewasa ini seringkali muncul sebagai hal-hal baru dalam bentuk kedok tradisional. Adanya masalah-masalah struktural yang

Seluruh dunia telah terintegrasi kedalam satu sistem ekonomi global. Apa yang semula tampak sebagai sisa-sisa masyarakat tradisional, dewasa ini seringkali muncul sebagai hal-hal baru dalam bentuk kedok tradisional. Adanya masalah-masalah struktural yang sama seperti kemiskinan, kegelisahan petani urbanisasi termasuk perluasan sektor informal tampaknya janggal karena munculnya identitas etnik dan budaya. Munculnya identitas etnis dan budaya itulah yang menimbulkan sifat-sifat yang berbeda secara regional.

- c. Tatanan ekonomi dunia yang ada sebelumnya telah berubah secara drastis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nampaknya semakin kompleks fenomena yang muncul ke permukaan semakin memerlukan pendekatan atau teori yang relatif cocok untuk menjelaskan fenomena tersebut. Sejalan dengan itu **Mithel J. Clyde (1969)** menyatakan :

" structural functional analysis represented a marked step forward in sociological analysis and provided a deeper understanding of behavior than had been possible before, particularly when applied to small scale localized societies. But, the inadequacy' of approach became apparent when social anthropologists began to direct their attention to more complex societies".

*) Staf Pengajar pada Program Magister Sosiologi Konsentrasi Urban Studies Universitas Riau

Menyimak pendapat Mithel di atas maka analisis terhadap masyarakat berukuran kecil jelas akan berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat kompleks atau masyarakat majemuk. **Garna (1987)** menyatakan bahwa masyarakat majemuk seperti dipusat-pusat kehidupan (kota, urban centers) yang majemuk menghadapi masalah tambahan yaitu penyatupaduan penduduknya yang berlainan etnik atau keturunan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa salah satu sifat utama masyarakat berbilang kaum (majemuk) sebagai kelompok etnik atau kelompok ras, hidup berdampingan itu dibawah satu unit politik yang sama. Setiap kelompok memiliki kebudayaan yang tersendiri, yang cenderung tidak pula mempunyai sistem nilai bersama.

Jika diikuti perkembangan sejarah bangsa kita terutama sejak tahun lima puluh sampai sekarang, tampak bahwa letupan emosional antara berbagai kaum atau etnik tidaklah sampai menjadi isu nasional. Generasi baru bermunculan dan tumbuh dalam iklim kemerdekaan dan kebersamaan. Banyak kelompok sudah kurang (paling tidak untuk generasi sekarang) memperhatikan asal usul etniknya. Selanjutnya, banyak pula orang berpendapat sehubungan dengan perkembangan waktu bahwa masalah kesukuan lambat laun akan memudar, buat apa mengungkit masalah antar etnik, mengapa pembaruan perlu diseminarkan, apakah dan mengapa semua itu menjadi masalah? Malah, banyak ilmuwan sosial yang mengikuti pandangan Marx dan Parsons tampaknya menghindari masalah keetnikan.

Menurut hemat penulis, terdapat sekurang-kurangnya tiga sebab membenarkan pembauran dalam hubungan integrasi nasional. *Pertama*, kita harus mengantisipasi terhadap adanya ramalan yang menyebutkan umat manusia akan menghadapi konflik dalam konfigurasi baru yang lebih rumit.

Nasib negara kebangsaan (nation state) terancam bubar dan diganti dengan Negara kesukuan (tribalisme) yang bisa mencapai sekurang-kurangnya 600 buah (Kompas, 1994). Dalam konteks regional

Abdulrahman Wahid melihat kecenderungan sektarian yang semakin kuat, khususnya dikalangan kaum profesional. Adi Sasono melihat kenyataan adanya golongan lain yang memiliki potensi persekutuan kelompok ekonomi mapan yang berskala menengah dan besar dan dikhawatirkan memunculkan dimensi agama sempit yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. *Kedua*, sebagaimana yang dinyatakan Gama (1987) yang menyatakan bahwa salah satu sifat utama masyarakat berkelompok ras yang hidup berdampingan dibawah satu unit politik yang sama. Setiap kelompok memiliki kebudayaan yang tersendiri yang cenderung tidak pula mempunyai sistem nilai bersama.

Ketidaksamaan, prasangka dan diskriminasi adalah ciri yang utama yang mungkin akan mengancam keutuhan serta kesatuan masyarakat. *Ketiga*, pembangunan menimbulkan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat baik social maupun ekonomi. Semua ini mempengaruhi struktur sosial masyarakat yang sekarang tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi baru.

Perubahan masyarakat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktahuan tentang masa depan sehingga menghasilkan kantong-kantong potensi guncangan dan keresahan sosial. Hubungan antar etnik dan ras memuat segi emosional yang mampu menyulut letupan guncangan sosial sehingga dibutuhkan pola pengelola perkembangan masyarakat yang dapat meniadakan potensi guncangan dan letupan sosial itu. Analisis relasi etnik dalam rangka integrasi nasional dibatasi pada aspek kedua dan ketiga saja sedang aspek pertama berdasarkan pertimbangan tertentu tidak dibahas dalam tulisan ini. Alasan lain adalah apabila masalah kedua dan ketiga dapat diselesaikan secara tuntas, maka peluang munculnya masalah pertama akan dapat diatasi.

II. MASYARAKAT SEBAGAI KELOMPOK ETNIK

Menurut pandangan-pandangan yang popular masyarakat dilihat sebagai

kekuatan impersonal yang mempengaruhi, mengekang dan juga menentukan tingkah laku anggota-anggotanya. Emile Durheim (1964) menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat bukanlah sekedar suatu penjumlahan individu semata-mata melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Keseragaman-keseragaman tingkah laku yang ditemukan dalam masyarakat tertentu haruslah dipandang sebagai produk masyarakat dan bukannya merupakan sifat yang asli dari setiap anggota masyarakat tersebut. Menurut **Koentjaraningrat (1993)** Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad ke-4 M. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan-kebudayaan suku budaya lokal. Kelompok etnik, ethnic group atau suku bangsa adalah istilah teknis dalam antropologi dan sosiologi yaitu konsep tentang kesatuan-kesatuan manusia atau kolektivita-kolektivita yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran itu sering dikuatkan (tetapi tidak selalu) oleh kesatuan bahasa. (Garna; 1987)

Menurut Naroll (1964) karakteristik etnik adalah :

1. is largely biologically self perpetuating
2. shares" fundamental cultural values, realized in overt unity in cultural form.
3. make up a field of communication and interaction
4. has a membership which identifies itself, and is identified by others, as constituting a category distinguishable from other categories of the same order.

Definisi yang ideal memang tidak berbeda jauh dengan yang umum kita kenal, yaitu bahwa suku bangsa = budaya = bahasa, sedangkan masyarakat suatu unit yang hidup terpisah dari unit lain. Yang paling penting adalah pengambilan asumsi bahwa mempertahankan batas etnik ini tidaklah penting, karena hal ini akan terjadi dengan sendirinya akibat adanya faktor-

faktor isolasi seperti : perbedaan ras, perbedaan budaya perbedaan sosial, dan perbedaan bahasa. Asumsi ini juga membatasi pemahaman berbagai faktor yang membentuk keragaman budaya ; ini mengakibatkan kita berkesimpulan bahwa tiap-tiap kelompok etnik mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolir. Kondisi terisolir ini terbentuk akibat factor ekologi setempat yang menyebabkan berkembangnya kondisi adaptasi dan daya cipta dalam kelompok tersebut. Kondisi semacam ini telah menghasilkan berbagai bangsa yang berbeda-beda di dunia, tiap bangsa dengan budayanya sendiri, dan membentuk masyarakatnya sendiri.

1. Kelompok Etnik Sebagai Unit Kebudayaan

Dari ciri kelompok etnik yang dikemukakan diatas kemampuan untuk berbagai sifat budaya yang sama merupakan ciri utama yang pantin. Ciri khusus ini bukan hanya merupakan ciri kelompok etnik lain, tetapi juga membenkan dampak yang lebih luas, apalagi dengan asumsi bahwa tiap kelompok etnik mempunyai ciri budaya sendiri terdapat dua hal pokok yang dapat dibahas dalam mengamati kehadiran kelompok-kelompok etnik dengan ciri-ciri unit budayanya yang khusus, yakni (1) kelanggengan unit-unit budaya dan (2) factor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya unit budaya tersebut.

- a. Dengan adanya aspek budaya ini, klasifikasi seorang atau kelompok setempat dalam keanggotaan suatu kelompok etnik tergantung pada kemampuan seseorang atau kelompok ini untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok tersebut
- b. Bentuk budaya yang tampak menunjukkan adanya pengaruh ekologi. Ini lebih tepat dikatakan bahwa bentuk budaya ini merupakan hasil penyesuaian para anggota kelompok etnik dalam menghadapi berbagai factor luar. Apakah suatu kelompok manusia dengan cita-cita dan nilai

tertentu akan mengikuti pola hidup dan memperlihatkan perilaku yang berbeda jika dihadapkan pada masalah yang berbeda dalam suatu lingkungan yang berbeda pula? Maka diharapkan bahwa suatu kelompok etnik yang tinggal tersebar didaerah dengan lingkungan ekologi yang bervariasi akan memperlihatkan perilaku yang berbeda sesuai dengan daerah tinggalnya (bersifat regional) tetapi tidak mencerminkan orientasi budaya yang berbeda.

2. Kelomok Etnik Sebagai Suatu Tatanan

Ditinjau dari segi sosial, maka kelompok etnik dapat dipandang sebagai tatanan sosial. Dalam hal ini yang menentukan adalah batasan ke 4 dari apa yang dikemukakan Naroll sebelumnya yaitu yang menentukan ciri khas sendiri yang dapat dilihat oleh kelompok lain. Ciri asal yang bersifat kategoris adalah ciri khas yang mendasar dan secara umum menentukan seseorang termasuk kelompok etnik mana, dan ini dapat diperkirakan sebagai tatanan sosial. Kelompok etnik sebagai tatanan sosial bila seseorang menggunakan identitas etnik dalam mengkategorikan dirinya dan orang lain untuk tujuan interaksi.

Penting untuk diingat bahwa meskipun kategori etnik rnenpertimbangkan perbedaan budaya, kita tidak dapat begitu saja mengasumsikan hubungan etnik dengan kesamaan atau perbedaan dalam budaya secara sederhana. Yang dinilai bukanlah seberapa banyak perbedaan yang "objektif, tetapi perbedaan mana yang dianggap penting oleh sipelaku (anggota kelompok etnik). Bukan saja vanasi ekologi yang menandai dan memperbesar perbedaan ini ; bebrapa bentuk budaya digunakan oleh si pelaku untuk menandai perbedaan-perbedaan ini, sementara bentuk budaya lain tidak diperhatikan, bahkan dalam beberapa hal perbedaan yang radikal diabaikan. Kadar budaya dan dikotomi etnik dapat dibedakan atas dua macam : (1) tanda atau gejala yang nampak, yaitu bentuk budaya yang bersifat membedakan yang biasanya digunakan untuk menentukan identitas seseorang,

misalnya pakaian, bahasa, bentuk rumah, atau gaya hidup secara umum dan (2) nilai-nilai dasar, misalnya standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang kedalam suatu kelompok etnik, ia akan menjadi seseorang dengan identitas dasar tertentu, dan ini berarti ia akan dinilai dan menilai dirinya sendiri berdasarkan standar yang relevan dengan identitas dasar tersebut.

III. SISTEM SOSIAL POLIETNIK

Sistem sosial polietnik sebagaimana dinyatakan Fumivall (1944) ;

" Comparising two or more elements or social order which live side by side, yet with out mingling in one political unit ":

Konsep ini tersusun dalam periode zaman Hindia-Belanda yang menekankan penggolongan I pengelompokan mulai dari orang Belanda, Timur Asing dan Pribumi dalam kedudukan berbagai aspek penghidupan sosial, ekonomi maupun politik. Esensi dari pernyataan Furnivall ini bahwa suatu masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana system nilai yang dianut oleh berbagai kelompok sosial yang menjadi bagian bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat sebagai keseturuhan kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. (Belshaw 1963). Atau kalau ingin meminjam istilah Clifford Geertz maka masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dalam mana masing-masing sub-sistem terikat kedalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Namun yang penting adalah pengertian masyarakat majemuk ini (dalam masyarakat Indonesia) harus dimengerti didalam konteks perbedaan-perbedaan intemasional diantara golongan pribumi. Menurut **L.van den Berghe (1966)** menyebutkan beberapa kateristik sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk ;

1. terjadinya segmentasi kedalam bentuk kelompok-kelompok yang

-
- sering kali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
 2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer.
 3. kurang mengembangkan sifat consensus diantara mereka terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
 4. secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
 5. secara relatif integrasi sosial diatas paksaan dan saling ketergantungan didalam bidang ekonomi.
 6. adanya dominasi politik oleh satu kelompok atas kelompok yang lain.

Pernyataan Berghe memang terasa lebih bersifat negatif, walau disisi lain masih ada hal-hal yang bersifat positif. Kepositifan sifat hubungan antar etnik ini apa kita berangkat dari awal interaksi dimana lebih banyak bertolak pada cara pikir harus dalam konteks manusia yang berbeda sejarah dan budaya yang berbeda. Bila pemahaman ini muncul ke permukaan, maka diharapkan timbulnya sikap saling ketergantungan satu sama lain. Ikatan positif yang menjalin hubungan antara beberapa kelompok etnik dalam suatu sistem sosial yang luas sangat tergantung pada sifat budaya yang saling melengkapi. Kondisi demikian dapat menimbulkan saling ketergantungan atau kondisi simbiosis.

Sistem sosial sangat berbeda sehingga identitas etnik sebagai status yang menentukan, membatasi gerak seseorang. Bila nilai-nilai yang berhubungan dengan identitas etnik tidak begitu sesuai dengan kegiatannya, maka tatanan sosial yang terbentuk juga terbatas. Di lain pihak, sistem polietnik yang kompleks selalu mengikuti perbedaan nilai yang ada dan relevan. Dalam sistem yang demikian, mekanisme dalam mempertahankan batas etnik sangat efisien :

- a. Kompleksitas timbul berdasarkan adanya perbedaan budaya yang penting *dan* saling melengkapi.

- b. Perbedaan ini harus dibakukan secara umum dalam kelompok etnik yang bersangkutan, yaitu kelompok satu atau status sosial setiap anggota kelompok umumnya sama, sehingga interaksi antar etnik berlangsung atas dasar identitas masing-masing etnik.
- c. Ciri budaya setiap kelompok harus benar-benar stabil, sehingga perbedaan yang saling melengkapi yang menjadi dasar sistem itu, dapat bertahan selama berlangsungnya kontak antar etnik.

Bila kondisi ini dapat dipenuhi, maka kelompok-kelompok etnik dapat melakukan adaptasi yang stabil dan bersifat simbiosis. Saling ketergantungan dapat dianalisis dari dua perspektif yakni perspektif ekologi dan perspektif demografis. Perspektif ekologi ini terlihat dalam beberapa bentuk. Bila terjadi kontak antara dua kelompok etnik atau lebih, maka adaptasinya umumnya mengikuti bentuk-bentuk dibawah :

- a. Mereka menempati daerah dengan lingkungan alam tertentu, sehingga persaingan dalam memperebutkan sumber daya hanya minimal. Dalam hal ini ketergantungan antara mereka adalah kecil, walau mereka hidup bersama dalam suatu daerah. Dan hubungan biasa berbentuk hubungan dagang, atau mungkin juga dalam kegiatan adat.
- b. Mereka dapat pula menguasai daerah yang terpisah dengan persaingan dalam mendapatkan sumber daya. Artikulasi yang timbul terjadi diperbatasan berupa kegiatan politik atau mungkin sektor lain.
- c. Mereka dapat pula saling menyediakan barang atau jasa dan tinggal didaerah yang berbeda dan saling menunjang.

Perspektif demografis merupakan sebagian dari cara memberi adaptasi kelompok etnik. Walaupun memperlihatkan struktur kualitatif dari daerah yang dihuni

suatu kefompok, jumlah dan keseimbangan dalam tingkat adaptasi juga harus diperhatikan. Bila suatu populasi sangat tergantung pada caranya memanfaatkan alam yang mereka tempati, maka tingkat adaptasinya dibatasi oleh kemampuan alam tempat populasi itu berada, dan adaptasi yang stabil akan mengendalikan besarnya populasi. Sebaliknya bila dua populasi saling tergantung secara ekologis, maka variasi dari besar populasi satu kelompok etnik akan mempengaruhi populasi etnik lainnya.

IV. SUDUT PANDANG TERHADAP KENYATAAN SOSIAL

Bila dirunut kembali keberadaan sosiologi atau antropologi sebagai ilmu menunjukkan bahwa para ahli dari ilmu ini tidak memiliki wawasan /sudut pandang yang tunggal tentang kenyataan sosial dalam masyarakat. Karena itu akan lebih tepat untuk melihat kenyataan sosial dalam masyarakat berdasarkan berbagai perangkat yang saling berkaitan. Artinya sudut pandang tersebut harus dilihat sebagai saling melengkapi dan tidak dimaksudkan sebagai perangkat pandangan alternative tentang kenyataan sosial.

1. Sudut Pandang Masyarakat

Sebagai ilustrasi, adanya gambaran bahwa pada masyarakat Amerika dewasa ini lebih menekan konformitas, orang-orang sangat cenderung untuk menjadi sama seperti sesama orang lain. Di sisi lain, nampak adanya kecenderungan yang meningkat diantara kelompok pemuda untuk bereaksi melawan dan mencemooh konformitas. Tegasnya mereka sama-sama memandang masyarakat sebagai suatu kekuatan besar yang mengekang dan menindas individu. Karenanya, masyarakat dilihat sebagai kekuatan impersonal, yang mempengaruhi, mengekang dan juga menentukan tingkah laku anggota anggotanya. Menurut **Emile Durkheim (1964)** masyarakat merupakan kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat bukanlah hanya

sekedar suatu penjumlahan individu semata-mata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antara mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-ciri sendiri.

Untuk memahami manusia dalam masyarakat, kita harus memasukkan hakekat kemanusiaan kedalam analisis. Wawasan tentang masyarakat harus dilengkapi dengan wawasan-wawasan lain bila mana kita ingin memahami tindakan manusia.

2. Sudut Pandang Sistem

Sudut pandang sistem ini merupakan pengembangan dari sudut pandang masyarakat. Konsep sistem dapat dikenakan pada masyarakat, ia dapat juga dihubungkan dengan sektor-sektor yang terbatas dari kehidupan individu. Sistem terutama menunjukkan pada cara bagaimana kehidupan sosial diatur dan diorganisir. Ia dapat menunjukkan pada masyarakat dalam skala besar ataupun pada suatu sektor tertentu dalam masyarakat, misalnya sektor pendidikan atau suatu kelompok kecil lainnya seperti keluarga. Menurut wawasan sistem sosial ini, kehidupan sosial diatur sedemikian rupa sehingga setiap aspek dari kehidupan sosial secara rumit, walaupun secara tidak langsung berhubungan satu sama lain. Perubahan pada unsur apapun dalam suatu sistem ditentukan oleh unsur-unsur lainnya dan demikian pula setiap unsur merupakan unsur determinan unsur lainnya. Sifat deterministik dari wawasan sistem memberikan kemungkinan melakukan peramalan-peramalan. Artinya ketika dapat melihat dan meramalkan kejadian-kejadian atau akibat dari kejadian sebelumnya.

Terdapat dua bentuk utama bagaimana unsur-unsur yang beraneka ragam dalam sistem sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Pertama adalah dimana suatu perubahan yang disengaja dalam suatu aspek kehidupan tertentu menghasilkan reaksi pada aspek lain sedemikian rupa sehingga sistem tersebut kembali kepada keadaan semula. Kedua ialah dimana suatu perubahan tertentu didalam suatu aspek kehidupan tertentu

menghasilkan akibat pada aspek-aspek yang lain sedemikian rupa sehingga memperbesar perubahan yang terjadi dalam sistem.

Oleh karena itu, pendekatan sistem cenderung untuk menitik beratkan perhatiannya pada mekanisme-mekanisme dengan mana sistem sosial mempertahankan dirinya pada kegiatan semula; mekanisme dengan mana ekuilibrium serta status quo dipertahankan. Di sisi lain, dalam pendekatan sistem seseorang individu sebagai manusia hampir hilang sama sekali dari pandangan. Sebab, komponen dari suatu sistem bukanlah manusia individu akan tetapi sub sistem-sub system seperti pendidikan, politik, ekonomi, keagamaan dan sub sistem lainnya. Komponen dari sub sistem bukanlah manusia individual, tetapi komponen yang biasanya digambarkan sesuai dengan fungsinya dalam sistem tersebut. Artinya kalau kita membicarakan kebutuhan, maka biasanya tak berbicara tentang kebutuhan manusia, tetapi tentang kebutuhan-kebutuhan sistem, untuk memenuhi dan mempertahankan kelangsungan sistem.

3. Sudut Pandang Kekuasaan Dan Konflik

Menurut pandangan ini, masyarakat bukanlah yang membuat tuntutan, mengekang dan mengendalikan seseorang sebagai individu. Masyarakat ternyata terdiri dari "mereka" dan "kita". "mereka" adalah yang membuat tuntutan dan melakukan pengendalian terhadap "kita"; mereka adalah pihak yang berwenang dan yang mengambil keputusan-keputusan. Perspektif ini adalah bahwa ia meletakkan tekanan yang berada terhadap sifat impersonalitas dari perspektif "masyarakat" dan "sistem". Bila wawasan masyarakat menuntut adanya kepatuhan (compromitas) dan wawasan sistem menekankan pada adanya suatu yang harus dipenuhi, pendekatan ketiga ini kita dituntut untuk menanyakan siapa yang menuntut kepatuhan dari siapa-siapa yang menentukan peran-peran yang harus kita mainkan dan kebutuhan-kebutuhan siapakah sebenarnya yang dikatakan sebagai kebutuhan sistem

atau masyarakat? Kita dapat membayangkan adanya suatu masyarakat dimana kekuasaan tersebut secara merata pada semua anggotanya tetapi kemungkinan besar masyarakat semacam itu tak akan pernah ada. Wawasan kekuasaan dan konflik menempatkan perhatian utamanya pada pembagian kekuasaan didalam masyarakat, dan keteraturan sosial yang ada di anggap tergantung pada pembagian kekuasaan tersebut.

Peraturan-peraturan yang menentukan posisi kita serta mengatur perilaku kita dalam kehidupan sosial dianggap mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang kuat dalam masyarakat. Wawasan kekuasaan berpegang teguh pada pandangan bahwa masyarakat terbentuk dari kelas-kelas sosial yang dibedakan berdasarkan kekuasaan. Kelas-kelas tersebut secara nyata atau secara potensial berada dalam konflik satu sama lain. Perbedaan porsi kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok atau kelas sosial dikaitkan dengan konflik diantara kelompok-kelompok tersebut, baik yang potensial maupun yang nyata. Hal ini sejalan dengan "proposisi" yang menyatakan penggunaan kekuasaan oleh kelompok yang telah berkuasa selalu (sedikit atau banyak) merugikan kelompok yang tidak berkuasa.

Pihak penguasa politik bila berhadapan dengan pihak oposisi jarang mengatakan bahwa mereka adalah tuan yang berkuasa dan kaum oposisi tidak, walaupun pada kenyataannya oposisi selalu kalah karena tak punya kuasa. Suatu pemerintah lokal yang mendapat tantangan dari sekelompok penduduk yang dirugikan oleh program perumahan yang ada, misalnya, dapat mengacuhkan saja oposisi tersebut dan menuduhnya sebagai korban hasutan kelompok politik tertentu sebagai tuntutan yang tak rasional serta tidak mewakili suara hati masyarakat banyak. Biasanya, kegagalan kelompok oposisi sering kali disebabkan oleh tidak adanya kekuasaan dihadapan penguasa setempat, dan bukannya karena tidak ada argumentasi yang rasional.

Terakhir dinyatakan bahwa perspektif ini sifat kurang deterministic. Ia

bersifat manusiawi karena ia menitik beratkan perhatiannya pada kebutuhan individu dari pada kebutuhan masyarakat. Kita dipaksa untuk menanyakan kebutuhan siapa yang akan dilayani oleh masyarakat. Kendatipun demikian, wawasan konflik tersebut seyogyanya tidak dilihat sebagai suatu alternatif dari wawasan " masyarakat " atau wawasan " sistem ", tetapi sebagai pelengkap yang dibutuhkan oleh wawasan tersebut.

4. Sudut Pandang Individualistik

Masyarakat, sistem, kelas sosial, merupakan konsep yang luas. Padahal perspektif individualistis memperhatikan hal-hal yang sepele, remeh, biasa dan umum, serta sehari-hari dari gejala-gejala sosial. Mungkin kita hanya membicarakan hal-hal kelompok kecil, apakah membicarakan hal-hal yang kecil itu tidak berkaitan dengan isu-isu sosial yang besar ?

Wawasan ' individualistis ' meneliti struktur masyarakat dengan bertitik tolak pada konstruksi individu-individu terhadap dunia sosialnya. Konstruksi ini mencakup pula penilaian seseorang terhadap kegiatannya sehari-hari, yaitu pandangan-pandangan tentang tingkah laku apa yang pantas dan layak dalam situasi sosial sehari-hari. Disamping itu ia mencakup juga pandangan-pandangan yang lebih makro tentang susunan dan pengaturan masyarakat yang diatur dalam suatu hirarki status yang dengan kemampuan dan tingkatan moral tertentu atau atas perbedaan yang kuat dan yang lemah. Tingkah laku seseorang sehari-hari harus konsisten dengan pandangannya terhadap kedudukannya dan asumsinya tentang susunan keteraturan sosial!

Dari gambaran wawasan masyarakat, dimana individu sebagai makhluk yang ditentukan dan ditugaskan untuk memainkan peranan yang telah dipersiapkan oleh masyarakat untuknya. Namun bagi wawasan individualistis, masyarakat hanya ada kalau ia dimengerti oleh individu individu. Yang menentukan tingkah laku individu bukanlah semata-mata pengaruh sosial, melainkan persepsinya dan penafsirannya tentang pengaruh ini.

Dengan memusat perhatian pada penafsiran individu tentang situasi sosialnya, maka sebenarnya kita telah keluar dari determinisme yang kaku dari wawasan masyarakat dan sistem sosial. Penafsiran-penafsiran itu datangnya dari individu, bukan dari masyarakat, walaupun diakui bahwa individu-individu masih tetap dibatasi oleh masyarakatnya. Namun menurut wawasan individualistis, individu tidak hanya bertindak sesuai dengan defenisinya tentang situasi. Dalam tindakan-tindakannya, ia juga akan berusaha mempengaruhi cara orang lain dalam menafsirkan sesuatu kejadian. Sumbangan wawasan individualistis adalah perhatiannya yang terutama diberikan pada analisa terhadap makna dan penafsiran dari kejadian-kejadian yang dialami orang-orang yang terlibat didalamnya.

Dari keempat sudut pandang ini, yang penting dalam upaya analisis masyarakat majemuk dalam -hubungan interaksi antar etnik adalah konsep konsep yang terkandung didalamnya. Konsep-konsep itu terdiri dari konsep konsep pokok dan konsep tambahan yang terkandung dalam konsep pokok tersebut

V. PENDEKATAN TEORITIS

Sesuai dengan masalah bahasan, yakni relasi etnik dalam berkaitan dengan integrasi nasional, perlu dikaitkan dengan bahasan **Ritzer (1980)** mengenai masalah PARADIGMA. Sesuai dengan pengertian paradigma itu sendiri dalam setiap paradigma tadi terkandung asumsi dasar, pokok persoalan, teori-teori dasar yang membangunnya dan metoda penelitiannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paradigma tersebut memberi bimbingan dalam mengkaji peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kajian ini lebih menitik beratkan pada paradigma FAKTA SOSIAL. Paradigma fakta sosial terpaut pada antar hubungan antara struktur sosial, pranata sosial dan hubungan antara individu dengan struktur sosial serta antar hubungan antara individu dengan pranata sosial.

Ada empat varian teori yang

tergabung kedalam paradigma fakta sosial masing-masing ;

1. Teori Fungsional- Struktural
2. Teori Konflik
3. Teori Sistem
4. Teori Sosiologi Makro

1. Teori Struktural - Fungsional

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Oleh karena sifatnya yang demikian, Nasikun (1991) menyatakan aliran pemikiran tersebut sebagai integration approach atau equilibrium approach. Teori ini berpijak pada pemikiran August Comte yang dikembangkan oleh Herbert Spencer. Pembahasan **Spencer (1895)** tentang masyarakat sebagai suatu organisme hidup dapat diringkas dalam butir-butir berikut ini :

1. Masyarakat maupun organisme hidup sama-sama mengalami perubahan.
2. Disebabkan oleh penambahan dalam ukurannya, maka struktur tubuh sosial (social body) itu mengalami penambahan pula, dimana semakin besar suatu struktur sosial maka semakin banyak pula bagian-bagiannya, seperti halnya dengan sistem biologis yang menjadi semakin kompleks sementara ia tumbuh menjadi semakin besar.
3. Tiap bagian yang tumbuh didalam tubuh organisme biologis maupun organisme sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu; mereka tumbuh menjadi organ yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula.
4. Baik dalam sistem organisme maupun sistem sosial perubahan pada satu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya didalam sistem secara keseluruhan. Perubahan sistem politik akan

mempengaruhi keluarga, pendidikan, agama dan sebagainya. Bagian-bagian itu saling berkaitan satu sama lain.

5. Bagian-bagian tersebut, walau saling berkaitan merupakan suatu struktur-mikro yang dapat dianalisis secara terpisah.

Perwujudan yang paling mendasar/penting dari pendekatan tersebut tergambar didalam usaha untuk menerangkan hubungan antar konsep struktur dan fungsi yang sudah muncul didalam pikiran Spencer. Emile Durkheim dan kemudian mencapai bentuk yang jelas didalam pemikiran para antropologi inggris seperti Bronislaw Malinowski dan Redcliffe Brow. Pendekatan kedua yang menyumbang buah pikiran tentang hakekat analisa fungsional yang dibangun diatas model organis. Pemahaman Redcliff-Brown mengenai fungsionalisme-struktural merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer:

Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti penghukuman, kejahatan, adalah merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan, karena itu merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural. Pendekatan tersebut diatas, mencapai tingkat perkembangannya khususnya didalam pemikiran Talcott Parsons. Pendekatan structural fungsional dapat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar sebagai berikut :

1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian bagian yang saling berhubungan.
2. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.
3. sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis.
4. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-

penyimpangan senantiasa terjadi juga akan tetapi didalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi.

5. Perubahan-perubahan didalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner.
6. Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan : penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan yang datang dari luar pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional ; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
7. Faktor yang paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai kemasyarakatan tertentu.

Dalam pada itu anggapan dasar dari teori struktural fungsional antara lain kecenderungan untuk mencapai stabilitas atau ekuilibrium diatas konsensus para anggota masyarakat akan nilai-nilai umum tertentu akan mengabaikan kenyataan berikut :

- a. Setiap struktur sosial didalam dirinya sendiri mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal.
- b. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan.

Atas dasar itu teori ini menjadi sasaran kritik terutama mengabaikan perubahan dan menghindarkan konflik. Karena itu teori konflik menjadi perhatian khusus, sebagai suatu jalan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi yang tidak mendapat perhatian dari struktural fungsional.

2. Teori Konflik

Berbeda dari teori struktural fungsional, maka pandangan/pendekatan konflik berpangkal pada asumsi dasar sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya atau dengan perkataan lain konflik adalah merupakan gejala yang melekat didalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam setiap masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atau sejumlah orang lain.

Bila dilihat dari kedua teori ini, nampaknya ada semacam 'dua wajah' yang bertentangan ; namun jika dikaji lebih dalam maka terlihat adanya sifat yang saling melengkapi. Sebab bagaimana pun juga masalah konflik memang sudah ada sejak abad teori-teori yang dianut oleh penganut Darwinisme sosial sampai kepada teori CW Mill (1956), Lowes Coser (1956), Dahrendorf (1956), Lenski (1975), R. Collins (1975) dan RF. Appelbaum (1978). Penganut pendekatan konflik, seperti halnya pendekatan struktural fungsional, jelas mengalami kelemahan-kelemahan tertentu. Namun kelemahan yang satu diatasi dengan keunggulan teori yang lain. Dengan demikian, kedua teori ini perlu disintesakan untuk menganalisa bagaimana suatu sistem sosial bekerja.

Pertimbangan mensintesakan kedua teori ini sesuai pula dengan anjuran Van den Berghe (1969) yang menyatakan bahwa '*structural functional approach dan conflict approach*' adalah bersifat komplementer dan oleh karena itu masih dapat dipakai untuk tujuan analisis yang berbeda, tidaklah cukup. Ada empat hal dimana kedua teori ini disintesakan :

1. Keduanya bersifat holistic
2. Anggapan dasar masing-masing dapat berperanan ganda

3. Memandang proses perubahan sosial sebagai perubahan yang bersifat evolusioner
4. Keduanya merupakan equilibrium model

Diakui pula bahwa pendekatan kedua teori ini akan teras kurang memadai terhadap relasi yang mengarah pada integrasi. Namun demikian, dengan memperluas teori lain sebagaimana juga dianjurkan Mitchel J Clyde sebagaimana tertera pada awal tulisan ini. Clyde mengembangkan konsep jaringan sosial sebagai konsep untuk melengkapi analisis teori structural fungsional (dan tentu pula teori konflik).

VI. TEORI JARINGAN SOSIAL

Pada tahapan tingkah laku lahiriyah, suatu relasi sosial menyangkut seperangkat interaksi antara dua individu yang mengenal satu sama lainnya. Untuk mengerti relasi itu bukan saja memahami segi tingkah laku yang berlangsung tetapi juga segi akibat atau kognitifnya, karena setiap pihak memikirkan apa yang dialami secara interaksi berlaku. Jadi relasi antar individu itu dinamik, yang pada tahapan tingkah laku mungkin memberikan akibat untuk mendatang dan sikap para pelaku itu dapat berubah dalam proses perkembangannya (**Garna, 1987**). Banyak hasil karya para sosiolog yang berisikan usaha-usaha untuk membuat kategorisasi hubungan-hubungan sosial tersebut. **Cooley (1902)** membedakan antara hubungan primer dengan hubungan sekunder. Menurut Cooley maka gejala yang menonjol dalam hubungan primer adalah hubungan tatap muka yang erat dan gotong royong sehingga kepentingan pribadi lebur kedalam kepentingan umum.

Hubungan sosial juga diungkapkan oleh **Tonnies (1940)** dan **Durkheim (1949)** serta **Inkeles (1965)** secara khusus Inkeles melihat bahwa dalam menggambarkan hubungan-hubungan sosial, dapat dibedakan antara kuantitatif dan aspek kualitatif. Malah, hubungan sosial ini merupakan bahasan Parsons yang tergambar dari konsep "*pattern variable*". Intinya adalah apa bila seseorang melakukan perbuatan dan juga

didalam rangka menerangkan peranannya, maka seseorang akan memberikan tekanan pada salah satu variable diantara lima pasang variable tersebut.

Apabila peranan bersifat khusus (spesifik) maka hubungan-hubungan sosial terbatas pada ruang lingkup pengaruh yang sempit. Apabila sifatnya luas atau umum ("*difuse*") maka keterlibatan seseorang akan menyangkut berbagai hubungan. Didalam hubungan sosial maka seseorang mungkin memberikan tekanan pada afeksi atau lebih menekan pada pertimbangan interumental atau moral. Seseorang akan lebih mempertimbangkan orang-orang dengan siapa dia berhubungan apabila dia memberikan tekanan pada 'particularism' sebaliknya apabila pandangan yang sama rata terhadap semua orang maka ia lebih menekankan segi 'universalism'. Demikian seterusnya.

Alvin L Bertrand (1972) membedakan empat cara mungkin ditempuh oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mulai berinteraksi antara lain:

1. Interaksi timbal-balik Interaksi dengan cara ini lebih berdasarkan consensus dan persetujuan yang bersifat timbal-balik. Interaksi jenis ini tidak selamanya terjadi secara langsung; seringkali rangsangan aksi yang diperoleh secara tidak langsung, meskipun masih tetap dalam kerangka kerja sama antara yang mengirim dan menerima pesan. Selama tidak terjadi suatu unsur paksaan cara untuk berinteraksi ini dapat dipandang sebagai suatu usaha bersama.

Usaha Sepihak Cara ini dimana individu atau kelompok tertentu memulai suatu interaksi dengan pihak lain yang sebetulnya tidak menaruh perhatian.

Paksaan dari Luar Beberapa interaksi timbul disebabkan oleh atau melalui penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa. Besarnya paksaan akan sangat tergantung pada tingkat oposisi yang difakukan oleh pelaku-pelaku utama dalam interaksi.

-
4. Keadaan lingkungan yang menguntungkan Faktor kebetulan sering merupakan suatu jalan untuk timbulnya suatu interaksi. Sorokin menyatakan bahwa gaya-gaya kosmik dan biologi, demikian pula kondisi sosio cultural menyebabkan orang berkeinginan untuk berkumpul bersama.

Adanya interaksi ini dimungkinkan apabila tersedianya jaringan hubungan diantara individu atau kelompok. Sulit dibayangkan apabila kita ingin berinteraksi tanpa tersedianya jaringan sosial. Menurut Clyde lahirnya konsep jaringan sosial berkaitan dengan ketidak puasan yang semakin berkembang pada analisis dan penelitian struktural fungsional. Gambaran jaringan hubungan sosial untuk menggambarkan satu kumpulan yang rumit antar hubungan dalam satu sistem sosial. Gambaran jaringan sosial diperkenalkan kedalam antropologi. Inggris sewaktu analisis struktural fungsional tidak sesuai dalam penelitian studi masyarakat kecil atau kesukuan.

Barnes memulai dengan studinya dengan membedakan dua jenis struktur yakni :

1. struktur yang dilihat dari segi teritorial dan,
2. struktur yang mengarah pada kegiatan untuk satu waktu relatif singkat.

FE Kortz menunjukkan pada kegunaan gagasan jaringan social dengan dasar pemikiran bahwa 'terdapat kesenjangan konseptual antara para ahli sosiologi makro dengan ahli sosiologi mikro dan antara strukturalis normatif dengan interaksionis behavior. Ia mengusulkan satu cara melihat jaringan sosial dengan harapan bahwa cara ii dapat menutup sebagian dari kesenjangan yang ada.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa para ahli antropologi sosial mulai mengarahkan perhatian mereka pada masyarakat yang lebih kompleks. Dengan pendekatan structural terlihat terlibat generalisasi mengenai perilaku orang dalam hubungan dengan posisi-posisi

yang mereka tempati. Tapi generalisasi ini (karena bersifat umum) maka mengabaikan hal-hal yang bersifat penyimpangan-penyimpangan. Menurut Van Velsen, justru penyimpangan-penyimpangan. ini merupakan unsur-unsur penting dalam tindakan sosial. Dalam studi Van Velsen, menggunakan analisis situasional dengan menggunakan konsep jaringan sosial.

Pada kenyataannya nampak ada tiga tatanan hubungan sosial yang berbeda yang merupakan karakteristik masyarakat ukuran besar, khususnya bila dilihat dalam sistem sosial di perkotaan (**Mitchel,1959 ; Epstein, 1962**). Tiga tatanan itu adalah sebagai berikut :

1. Tatanan struktural dengan mana perilaku orang ditafsirkan dalam hubungan dengan tindakan yang tepat pada posisi yang mereka tempati dalam kumpulan posisi yang teratur.
2. Tatanan menurut kategori dengan mana perilaku orang dalam situasi terstruktur dapat ditafsirkan dalam hubungan dengan stereotipe tertentu.
3. Tatanan personal, dengan mana perilaku orang baik dalam keadaan terstruktur atau pun tidak ditafsirkan dalam hubungan dengan hubungan peribadi.

Studi mengenai gagasan jaringan sosial dalam penelitian perlu dibedakan sifat-sifat dan karakteristik tertentu dari jaringan sosial untuk menjelaskan perilaku yang dicari. Mengenai sifat jaringan ini, Barnes menyebutkan sebagai 'mesh' (mata jala) dari suatu jaringan sedangkan Bott mengartikan sebagai 'connectedness' (ketersambungan). Maminjam konsep Barnes, **Redfield (1982)** menengahkan apa yang disebut sebagai konsep , medan social. Selanjutnya dinyatakan bahwa medan sosial dapat dilihat dari tiga jenis yang berbeda yakni :

- a. Medan sosial teritorial
- b. Medan sosial pasar
- c. Medan sosial jaringan kerja

(a). Medan Sosial Teritorial

Medan sosial yang berdasarkan teritorial dengan sejumlah besar unit-unit administratif yang bertahap lama yang

tersusun secara khirarhis, satu didalam yang lainnya. Oleh karena didasarkan pada serentetan unit-unit yang terdiri dari orang-orang yang berhubungan secara personal dan tradisional satu sama lain, di sana hubungan kekerabatan dan ketetanggaan adalah hubungan yang lebih menguasai.

Di puncak rentetan tersebut adalah orang-orang yang berada dalam hubungan yang lebih impersonal dan formal satu sama lain. Sebagai suatu sistem sosial yang tersusun secara hierarkis, masyarakat petani adalah dua paruhan yang berhubungan. Kita bisa melihat sejenis mata rantai atau engsel antara kehidupan local masyarakat petani dan Negara atau sistem feodal dimana dia merupakan bagiannya. Mata rantai ini dapat mengambil berbagai bentuk seperti pegawai administrative, tokoh agama, kaum professional dan orang-orang kaya yang berada di desa.

(b). Medan Sosial Pasar

Medan sosial pasar secara dini dapat dilihat hubungan dengan individu dengan berbagai macam status posisi. Pasar merupakan tempat yang menarik keluar komunitas kedalam medan-medan ekonomi yang semakin tidak tergantung dari sebagian yang berlangsung dalam kehidupan local. Dunia tradisional dan moral local dan dua pasar yang lebih luas dan lebih impersonal berbeda dalam prinsipnya, bertentangan satu sama lain. Akan tetapi kehidupan local itu berbeda dengan kehidupan kota. Sebagian orang-orang kembali kedesa akan membawa perubahan-perubahan yang terjadi dikota.

(c). Medan Sosial Jaringan Kerja

Semua hubungan dari segala jenis orang desa satu sama lain dan dengan orang lain dimana saja, yang dibayangkan sebagai simpul-simpul dan titik-titik jaringan hubungan-hubungan apa pun jenisnya, adalah benang atau garis-garis. Lebih jauh jaringan hubungan ini disebut "jaringan seluas negeri".

Jaringan ini adalah bahwa setiap orang melalui hubungan kekerabatan, persahabatan, kenalan dan kepentingan bersama tertentu, berhubungan dengan sejumlahnya orang,

beberapa diantaranya berhubungan secara langsung dengan yang lain, dan beberapa lagi tidak. Di sana dia tidak mempunyai batasan : sama sekali juga menghubungkan mereka dengan anggota-anggota yang lain. Tentang masalah kekompakan, Barnes menjelaskan makna "mata jala" dalam masyarakat yang beragam baik masyarakat primitive maupun masyarakat maju atau urban. Ia menyatakan bahwa dalam masyarakat primitive ternyata mata jalanya kecil sedang dalam masyarakat urban mata jalanya besar. Tertutup atau terbukanya mata jala, tingkat atau ruang lingkup jaringan tersebut, jenis kepentingan manusiawi, apakah sesaat atau permanent semua element inilah yang harus dipertimbangkan dalam memahami jaringan-jaringan yang meluas ke seluruh negeri. Berkenaan dengan medan sosial, khususnya medan sosial pasar dan medan sosial jaringan kerja, memberi peluang terciptanya jaringan hubungan sosial. Sifat-sifat jaringan sosial ini menurut Mitchel dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek morphologis dan aspek interksional.

Sifat morphologis dari jaringan sosial dapat diselusuri melalui

1. Density
2. Reachability
3. Range

Sedang sifat interaksional dapat dilihat dari :

1. Content
2. Directedness
3. Durability
4. Intensity
5. Frequency

Melihat berbagai aspek dari sifat hubungan sebagai mana tersebut diatas akan memberikan informasi antara lain mengenai rapat atau longgarnya suatu hubungan (dalam hubungan dengan pemberlakuan norma), isi dari suatu hubungan, arah dari suatu hubungan (searah atau timbale balik), intensitas suatu hubungan (kekuatan mengikat atau tidak). Dalam kerangka konsep dari sifat-sifat jaringan sosial ini akan memberikan warna relasi sosial dari berbagai kelompok etnik yang ada. Analisis medan sosial umpamanya, khusus medan sosial pasar dan medan jaringan kerja dari berbagai kelompok etnik, memberi peluang

terciptanya ‘pembesaran skala’. Pembesaran tidak lain adalah proses integrasi dalam ikatan besar.

VII. PROSES INTEGRASI DALAM IKATAN BESAR

Dalam ‘A Dictionary of the Social Science’ baik Sorokin, Parsons, serta Hiller melihat bahwa integrasi sebagai interaksi dari berbagai pola kebudayaan yang akan berkisar pada nilai-nilai budaya, norma dan adapt kebiasaan dari berbagai sistem (William L. Kolb, 1964). Dalam kaitan ini pula Sayogyo (1977) menyatakan bahwa integrasi sosial antara dua suku bangsa mencerminkan integrasi antara dua pola kebudayaan.

Atas dasar terjadinya integrasi, Landecker (1962) mengemukakan ada empat tipe integrasi yakni :

- a. Integrasi Kultural
- b. Integrasi Normatif
- c. Integrasi Komunikatif
- d. Integrasi Fungsional

Integrasi Kultural, dimaksudkan sebagai relasi diantara berbagai sikap cultural yang membentuk standard cultural dalam pengertian cultural tadi satu sama lain saling memberikan dan memerlukan (ada sifat adherence atau saling mengikat). Integrasi normative dimaksudkan karena dalam setiap masyarakat warganya harus mentaati norma-norma yang berlaku. Tujuannya adalah agar ada kesesuaian dari tindakan tiap warga, walaupun akan bervariasi satu sama lain. Integrasi komunikatif, ditekankan pada pertalian dengan hubungan antar manusia. Ini tidak lain menyangkut derajat (tingkat) terbinanya hubungan yang baik dan merata keseluruhan kelompok. Landecker mengakui bahwa kelemahan-kelemahan didalam integrasi komunikatif sangat erat berkaitan (highly interdependency) dengan prasangka sosial.

Integrasi fungsional adalah integrasi yang menunjukkan adanya saling ketergantungan (mutual interdependency) di antara unit-unit dari suatu sistem pembagian kerja. Diakui bahwa dipandang dari sudut ekologi modern ketergantungan merupakan

hal yang sangat penting, di pihak lain akan sulit mengukurnya, karena ‘interdependency’ merupakan hal/ suatu gejala sosial dengan berbagai dimensinya. Perlu di catat bahwa Landecker berpendapat bahwa hanya Durkheim yang mampu menciptakan alat ukur integrasi fungsional. Di bagian lain Landecker menulis bahwa dengan meningkatkan pembagian kerja akan semakin sulitlah bagi anggota-anggota untuk memisahkan diri.

Berdasarkan uraian diatas, maka integrasi tidak lain adalah suatu proses yang dilandasi dengan keteraturan, kesesuaian, dan ketergantungan. Konsep-konsep ini tidak lain merupakan konsep utama dari teori structural fungsional mulai dari Durkheim sampai Parsons. Yang jelas adalah bahwa pada teori ini lebih mengutamakan aspek keseimbangan yang dinamis dari pada masalah konflik. Bagian dari sumbangan teori structural fungsional agaknya dapat kita lacak dari konsep persyaratan fungsional yang harus dipenuhi agar sistem dapat bertahan dan dalam keseimbangan. Di lain pihak jangan pula dilupakan bahwa integrasi itu sendiri merupakan hasil dari suatu proses. Konsekwensi dari proses ini jelas memberi peluang adanya perubahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat baik politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam konteks ini agaknya alur pemikiran dan konsepsi Durkheim yang tertuang dalam karyanya Division of labor suicide akan dapat menjelaskan fenomena perubahan, khususnya dalam hubungan kajian relasi etnik.

Buah pikiran Durkheim yang ia tuangkan dalam berbagai tulisan, jelas merupakan cerminan lingkungan intelektual, kondisi sosial ekonomi semasa ia hidup. Dapat kita sebut gejala alienasi yang meluas, sinisme yang meningkat (khusus terhadap institusi politik), standar moral pribadi yang berubah cepat (pola pekerjaan, seks, dan keluarga) dan banyak lagi suara berbagai kelompok yang terdengar dalam mengejar kepentingan ekonominya tanpa

memperhatikan kelompok lain, menunjukkan bahwa keadaan keteraturan sosial terancam oleh berbagai bentuk disintegrasi.

Karena itu sepanjang hidupnya, Durkheim memberikan tekanan sebagai pokok bahasan adalah masalah solidaritas dan integrasi sosial. Solidaritas menunjukan pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasarkan dari pada hubungan kontraktual yang dibuat atas dasar persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat consensus, terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontraktual.

Atas dasar konsep tersebut, dan dihubungkan dengan fenomena relasi etnik dinegeri ini timbul pertanyaan apakah memang ada kesesuaian gejala yang timbul sekarang dengan gejala dimasa lahirnya konsep Durkheim? jawabannya, prinsip adalah sama. Karena itu kedua konsep tersebut masih relevan untuk dipakai dalam kajian terhadap fenomena relasi sosial. Satu hal yang harus digaris bawahi bahwa kajian dan buah pemikiran Durkheim pada dasarnya terkandung satu model perubahan sosial yang umum. Artinya, suatu kajian terhadap perubahan solidaritas dan tentunya perubahan konsep ikutan lainnya seperti integrasi dan kekompakan sosial.

Durkheim membedakan solidaritas mekanik dan solidaritas organic. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu 'kesadaran kolektif' bersama, yang menunjuk pada totalitas 'kepercayaan-kepercayaan dan sentiment-sentiment bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Ciri khas yang penting adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada satu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentiment. Homogenitas serupa itu hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim. Berlawanan dengan itu, solidaritas organic muncul karena pembagian pekerjaan bertambah

besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan ini bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian kerja yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan antar/dikalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan ditingkat individu ini merombak kesadaran kolektif itu, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relative lebih otonomi sifatnya.

Kajian terhadap solidaritas sosial akan semakin penting apabila dihubungkan dengan masalah integrasi. Masalahnya adalah pendekatan structural fungsional atas dasar tradisi klasik seperti Durkheim sampai Parsons Tradisi klasik ini nampaknya masih berkisar pada sudut pandang yang bersifat makro (grand theory) dan akan terasa sulit bila dihubungkan dengan keadaan dan kenyataan empiric. Disamping itu pengalaman menunjukkan dimana adanya solidaritas kedalam (in-group) merusakkan solidaritas masyarakat secara keseluruhan. Sejumlah kasus yang serupa dengan ini dapat dilihat seperti misalnya kelompok agama, kelompok etnik, kelompok okupasional dan kelas sosial.

Analisa fungsional Durkheim mengenai agama misalnya dengan mudah dikritik dalam kontek ini. Dengan mempelajari bagaimana kepercayaan bersama dan upacara agama meningkatkan solidaritas, Durkheim mengabaikan peran agama dalam merusak solidaritas dan meningkatkan konflik dalam masyarakat-masyarakat yang terbagi-bagi menurut agama. Sesungguhnya dalam situasi seperti ini akan kelihatan bahwa akan semakin kuat solidaritas antar kelompok agama semakin besar ketegangan dan kemungkinan konflik antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya.

Ketegangan dan konflik seperti itu akan mungkin terjadi kalau ada ketidakcocokan fundamental antara berbagai kelompok agama mengenai kepercayaan dan

nilai pokok. Di lain pihak ketegangan dan konflik dapat ditekan kalau berbagai kelompok agama yang berbeda itu sama-sama memiliki kepercayaan dan nilai-nilai dasar tertentu yang fundamental. Agaknya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa akan dapat menjawab tantangan ini apa lagi dilaksanakan dalam perilaku sehari-hari. Kenyataannya masih ada pihak dan kelompok tertentu yang berlindung pada falsafah ini untuk mengembangkan sayapnya sehingga peluang dan potensi konflik pun akan semakin muncul ke permukaan.

Selain itu, berbagai kepentingan yang saling bertentangan antar kelompok dan organisasi (jangan lupa bahwa dengan berkembangnya spesialisasi cenderung membentuk sifat dan sikap yang lebih individualistik) yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat kompleks serta kelangkaan sumber-sumber maka pola adaptasi yang fungsional untuk satu kelompok atau kelompok segmental dalam masyarakat mungkin difungsional untuk yang lainnya. Dari apa yang telah disampaikan diatas memberi indikasi kepada kita bahwa melihat fenomena solidaritas dalam hubungannya dengan integrasi tidak cukup berlandas dan mengacu kepada tradisi klasik dan fungsional Parsons tetapi lebih mengarah kepada pendekatan fungsional Robert Merton. Sebagaimana kita ketahui bahwa Parsons mengembangkan suatu sistem teori yang komprehensif yang cukup abstrak dan umum untuk diterapkan pada semua tipe tindakan dalam struktur sosial dan semua tipe institusi budaya. Meskipun bagian-bagian tertentu dari karya Parsons sudah digunakan dalam penelitian empiris, kerangka teoritis sebagai satu keseluruhan kelihatannya lebih merupakan suatu model interpretative yang terinci dengan sejumlah satuan kategori untuk mengklasifikasikan berbagai aspek dalam kehidupan sosial, dari pada suatu teori yang memberikan suatu dasar bagi hipotesa-hipotesa prediktif tertentu.

Model analisis fungsional Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuannya tentang ahli-ahli klasik. Dia

menggunakan penulis-penulis besar seperti **Max Weber, William T Thomas, dan Durkheim** sebagai dasar bagi karyanya. Karya awal Merton sangat dipengaruhi oleh Weber dimana dapat dilihat dalam telaan terhadap birokrasi. Merton tidak berhenti dengan diskripsi tentang struktur akan tetapi terus membahas kepribadian sebagai produk organisasi struktur tersebut. Struktur organisasi memberi tekanan terhadap individu sehingga mereka menjadi disiplin, bijaksana metodis. Tetapi tekanan ini kadang-kadang menjurus pada kepatuhan mengikuti peraturan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan tujuan dan fungsi untuk apa aturan-aturan itu pada mulanya dibuat. Walaupun aturan-aturan tersebut dapat berfungsi bagi efisiensi organisasi, tetapi aturan-aturan yang demikian dapat juga memberikan fungsi negative yang menimbulkan kepatuhan yang n berlebihan.

Selanjutnya dengan menyempurnakan pernyataan klasik dari W.T Thomas ramalan yang terpenuhi karena kekuatannya sendiri 'Merton' akhirnya berpendapat bahwa strukturlah yang bertanggung jawab atas perilaku orang. Disini Merton berusaha menunjukkan bagaimana sejumlah struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan. Berdasarkan pernyataan diatas, Merton sampai pada tiga postulat yang digunakan dalam analisis fungsional yakni :

Postulat Pertama :

Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang mamdai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Di tegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta.

Ia menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integrative). Juga

ditegaskan bahwa apa yang fungsional suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi keseluruhan.

Postulat Kedua :

Yaitu fungsionalisme universal, yaitu yang berkaitan dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Berkenaan dengan konsep fungsi & disfungsi, dianjurkan agar elemen-elemen cultural seharusnya dipertimbangkan menurut criteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional yang menimbang fungsi positif relative terhadap fungsi negative. Ini disebutnya fungsi alternative.

Postulat Ketiga:

Adalah postulat indispensability. Ia menyatakan dalam setiap tipe peradaban setiap kebiasaan, ide, objek material dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton postulat ini masih kabur postulat indispensability mengandung dua pernyataan yang berkaitan satu sama lain. Atas dasar postulat yang ada, Merton selanjutnya mengetengahkan sebuah model atau paradigma yang bulat. Paradigma tersebut dapat dipakai untuk mengarahkan seorang penganut fungsionalisme yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis :

1. Bagaimana hakekat sistem yang dianalisis.? Apakah ia merupakan suatu kelompok etnik atau kultur tertentu sebuah kelompok kecil atau organisasi yang lebih besar. Hal ini perlu diperjelaskan oleh karena apa yang mungkin fungsional bagi suatu kelompok tidak dengan sendirinya fungsional bagi kelompok lain.
2. Sehubungan dengan masalah konsekuensi keseimbangan apakah

ada fungsi manifest maupun laten yang harus dipertimbangkan.

3. Bagaimana kita menentukan bahwa suatu persyaratan fungsional harus ada dalam satu sistem tertentu.? Disini Merton mengingatkan akan perlunya para penganut analisa fungsional memperhatikan alternative-alternative fungsional.
4. Apakah minat kaum fungsionalis terhadap isu tentang keteraturan (order) merintangai kemampuan mereka untuk melihat ketidakseimbangan.? Merton mengingatkan fungsionalis akan kemungkinan terjadinya perubahan sosial oleh karena suatu praktek kebudayaan atau norma yang ada bertentangan dengan sistem sosial.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, di ingatkan bahwa apa yang mungkin fungsional bagi suatu kelompok boleh jadi tidak demikian bagi kelompok lain juga harus di waspadaai untuk tidak melupakan fungsi-fungsi laten ketika sedang terbius fungsi manifest yang jelas terlihat.

VIII. KESIMPULAN

1. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnik dengan latar belakang perbedaan tingkat sosial ekonomi, sehingga dirasakan adanya kerawanan bila dilihat dari sudut kesatuan dan persatuan.
2. Adalah bijaksana bila mengangkat masalah ketidaksamaan dan keragaman antar etnik adalah semata-mata untuk memahami batas masing-masing. Memahami dan mengetahui batas sendiri dan batas orang lain memungkinkan terciptanya saling pengertian.
3. Usaha dan proses mengatasi batas identitas masing-masing mengarah kepada penyatuan wawasan masyarakat dan wawasan sistem. Dengan wawasan ini akan memberi peluang munculnya suasana saling ketergantungan fungsional.

4. Adanya sikap dan perilaku yang saling ketergantungan fungsional, normative, cultural dan komunikatif akan memberi warna kehidupan yang harmonis dan dinamika dalam keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admihardja, Kusnaka ;
Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan
An. Tarsito Bandung
1993
Kebudayaan Dan Lingkungan. Ilham jaya Bandung
Ali Abdul Wahid Waif ;
1983
Ibnu Khaldun; Riwayat Dan Karyanya; Graffiti Pers Jakarta
Appelbaum, P Richard ;
1970
Theories Of Social Change. Markham Publishing Company/ Chicago
Baston, M ;
1983
Racial and Ethic Competition. Cambridge, Cambridge Univ. Press
Bashtiar W. Harsya ;
1984
Budaya dan Manusia Indonesia. YP2LPM Malang
Barth Fredrik ;
1969
Ethnic Groups And Boundaries. Little. Brown and Company
Bean, FD & Frisbie. Wp ;
1978
The Demography Or Racial and Ethnic Groups. New York. Academic Press
Belshaw S. Cyril ; Tukar
1981
Menekar Tradisional Dan Pasar Modern . Gramedia Jakarta
Berger, Peter L ;
1985
Humani sme Sosiologi (terj); Inti Sarana Aksara Jakarta
Berger, Peter L & Hansfried ;
Kellner Sosiologi Ditafsirkan Kembali; Esei Tentang

- 1984
Methoda Dan Bidang Kerja (terj); LP3ES; Jakarta
Bertrand L. Alvin ;
1967
Basic Sociology, an Introduction To Theory and Method. Meredith Publishing Company, USA
1972
Social organization. A General Systems and Role Theory Perspektive. Fa Davis Company. Philadelphia.
Buckley, Walter ;
1967
Sociology and Modern System Theory, Prentice Hall. Inc; Englewood Cliffs, Ny
Campbell. Tom ;
1981
Seven Theories Of Human Society; Clarendum Press Oxford
Cosser A. Lewis ;
1964
The Funtions Of Society Conflict. The Free Press New York-Macmilan Ltd. London
Craib, Ian ;
1985
Teori-Teori Sosiologi Modern; dari Parsons sampai Habermas (terj); Rajawali; Jakarta
Danandjaja, James ;
1994
Folklore Indonesia, Ilmu Gossip, dongeng, Dan Lain-lain. Pustaka Utama graffiti
Danrendorf, Raph ;
1986
Komflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritik (terj); Rajawali; Jakarta
Durkheim, Emile ;
1964
The Division Of Labor In Society. The Free press New York
1965
The Elementary Forms of The religious Life. The Free Press: New York
1966
SUICIDE: The Free Press; New York
1966
Rules Of Sociological Method. The Free Press New York
Ever, Hans-dieter ;
1988
Teori Masyarakat: Proses Peradaban Dalam

- Sistem Dunia Modern. Yayasan Obor
Jakarta
- Galt H Anthony 7 Smith JI ;
1976 Models
And The Study Of Social Change
Schenman Publishing company, Inc. 3
MT. Auburn Place Cambridge, Mass
- Gama K. Yudistira ;
1992 Teori-Teori
Perubahan Social. Program Pasca
Sarjana Universitas Padjajaran
- Geertz, Hildred ;
1981 Aneka
Budaya Dan Komunitas di Indonesia.
YIIS & FIS UI
- Glazer Nathan and Monynihan P
Daniel (ed) 1981 ETHNICITY. Teori
and Experience. Harvard University
Press
- Glaser G. Barney ;
1990 Teori Sosiologi Klasik Dan Modern (terj)
Gramedia; Jakarta, Jilid I & II
- Laeyendecker, L ;
1984 Tata,
Perubahan Dan Ketimpangan. Suatu
Pangantar Sejarah Sosiologi (terj).
Gramedia
- Lauer H. Robert ;
1976 Perspektive
On Social Change. Boston: Allyn and
Bacon
- Marcell mause, alih Bahasa Inggris I.
Cunnison 1960 The Gift. London:
Cohen & West
- 1993 Masalah Kesukubangsaan Dan
Integrasi Nasional. UI-Press; Jakarta
- Keesing M Ronger ;
1992 Antropologi
Budaya. Suatu Perspektif
Kontemporer. Erlangga: Jakarta
- Parsons, Talcott ;
1964 The Social
System. The Free Press; New York
- 1965 Theories Of
Society. Foundations Of Modern
Sociological Theory. The Free Press
A Division Of Macmillan Publishing
Co, Inc New York
- 1980 Sosiologi,
Ilmu Pengetahuan Berparadigma
Ganda (terj). Rajawali Press Jakarta
- Redfield, Robert ;
1956 Peasant
Society and Culture. University Of
Chicago Press
- Rex John Race And Ethnicity. Open
University Press Milton Keynes
- Roxboroughh, Ian ;
1985 Teori-teori
Keterbelakangan. LP3ES
- Schoorl, JW ;
1980 Modernisasi. Pengantar Sosiologi
Pembangunan Negara Sedang
Berkembang. Gramedia. Jakarta
- Stanfield H John & Dannis M ;
Rufledge Race and
Ethnicity In Research Methods.
1993 Race
Publications, Newburry Park. Ldn
- Taufik Abdullah (ed) ;
1986 Durkheim Dan Pengantar Sosiologi
Moralitas. Yayasan Obor Jakarta
- Veeger. K.J ;
1993 Realitas Sosial. Refleksi Filsafat
Social Atas Hubungan Individu-
Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah
Sosiologi. Gramedia Jakarta
- Wallace, Ruth A and Alison Wolf ;
Contempopary Sociological Theory;
Conytinuing The Classical Tradition;
Prentice-Hall, Inc Englewood Cliffs
New Jersey
- Wolf R Eric;1983 Petani, Suatu Tinjauan
Antropologis. YIIS Jakarta